

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

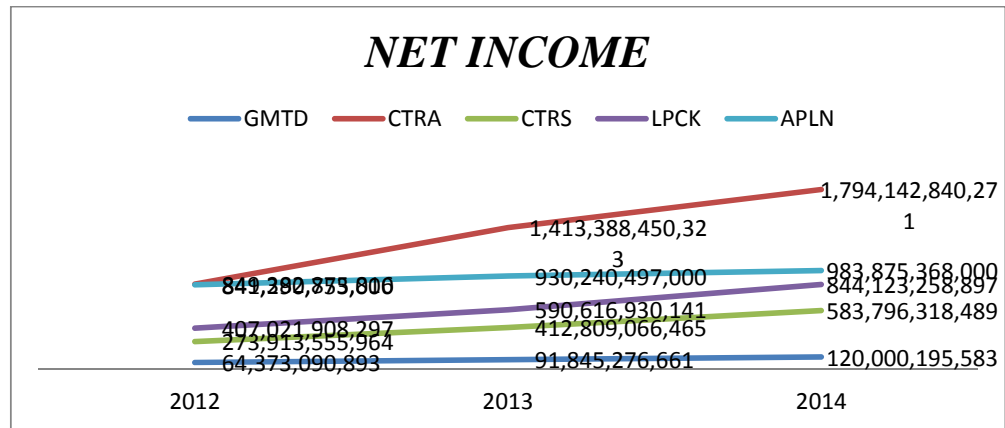
Laporan keuangan merupakan suatu sistem informasi yang relevan dan bermanfaat bagi pemakai informasi laporan keuangan meliputi: investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat umumnya. Laporan keuangan digunakan sebagai acuan para investor menilai sebuah perusahaan. Bettie *et al* (1994) menyebutkan bahwa perhatian investor seringkali hanya terpusat pada informasi laba, bukan pada prosedur untuk menghasilkan informasi laba tersebut, semakin banyaknya perusahaan yang harus melaporkan ke publik, semakin banyak pula perusahaan berusaha membuat laporan keuangan perusahaannya menjadi baik salah satunya dengan melakukan perataan laba (salah satu bentuk manajemen laba).

Perataan laba (*income smoothing*) adalah bagian dari pola manajemen laba yang dapat dilakukan manajer. Perataan laba adalah salah satu bentuk manajemen laba dengan cara meminimalisir laba yang berfluktuatif agar menjadi stabil. Investor lebih menyukai laba yang stabil karena investor menjadi lebih mudah memprediksi laba periode mendatang dan dengan laba yang stabil tersebut akan memberikan rasa aman dalam berinvestasi. Perataan laba (*income smoothing*) diilatarbelakangi oleh *the bonus plan hypothesis*, *debt covenant hypothesis*, dan *the political cost hypothesis*. Namun tindakan perataan laba ini menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak kredibel dan memberikan informasi yang tidak

sebenarnya, sehingga pengungkapan informasi mengenai laba menjadi menyesatkan bagi pengambilan keputusan oleh investor.

Menurut Suwito dan Arleen (2005) perataan laba dapat melalui beberapa dimensi perataan laba, yaitu: (1) perataan laba melalui kejadian atau pengakuan suatu peristiwa, (2) perataan laba melalui alokasi selama satu periode tertentu, (3) perataan laba melalui klasifikasi. Dilakukannya tindakan perataan laba ini biasanya untuk mengurangi pajak, meningkatkan kepercayaan investor yang beranggapan laba yang stabil akan mengurangi kebijakan deviden yang stabil dan menjaga hubungan antara manajer dan pekerja untuk mengurangi gejala kenaikan laba dalam pelaporan laba yang cukup tajam.

Tindakan perataan laba ini dapat diminimalisir dengan diterapkannya *good corporate governance*. *Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. *Good corporate governance* dapat mengatasi masalah keagenan dan mencegah perataan laba yang berlebihan tetapi pada Perusahaan sektor *Property* dan *Real Estate* hingga kini belum ada ketetapan dalam kewajiban menerapkan *Good corporate governance* layaknya perusahaan pada sektor perbankan.



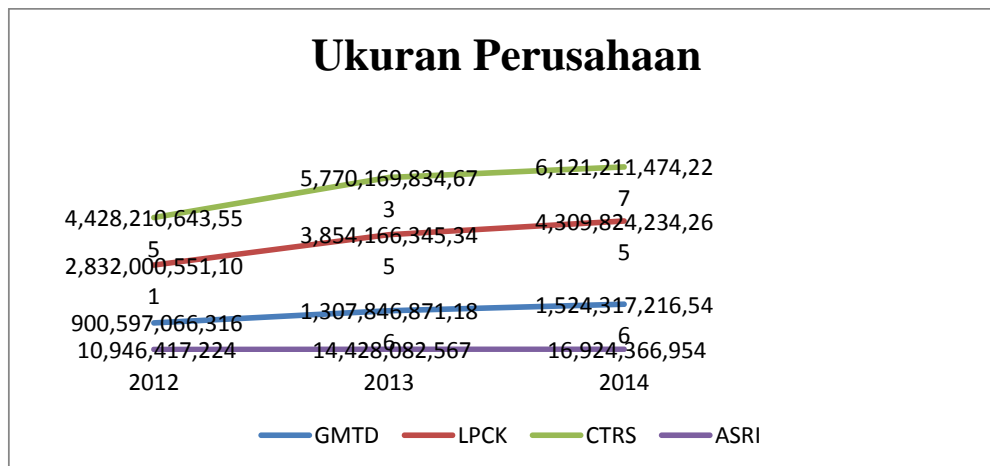
Sumber : Data diolah sendiri

**Gambar 1.1**  
**Net Income**  
**Perusahaan Property & Real Estate Periode 2012-2014**

Dari gambar 1.2 yakni hasil laba bersih untuk tiga tahun terakhir (tahun 2012-2014) perusahaan dari terlihat bahwa rata-rata laba bersih setiap perusahaan meningkat. Hal ini dapat dilihat bahwa semua perusahaan *Property* dan *Real Estate* mengalami kenaikan karena adanya preingkatan penjualan serta baik dalam mengelola biaya-biaya selama tiga tahun terakhir.

Salah faktor yang mempengaruhi perataan laba adalah ukuran perusahaan. Terdapat dua pandangan mengenai ukuran perusahaan pada perataan laba. Pandangan pertama menyatakan bahwa perusahaan yang besar cenderung tidak melakukan perataan laba karena mendapat pengawasan dan perhatian yang lebih ketat oleh banyak pihak seperti pemerintah dan masyarakat sehingga perusahaan akan lebih akurat dalam mengungkapkan laporan keuangannya. Sebaliknya pandangan kedua menyatakan bahwa perusahaan yang besar cenderung melakukan perataan laba karena adanya motivasi penghindaran pajak dan biaya

politik (Watts and Zimmerman, 1986). Definisi ukuran perusahaan itu sendiri adalah suatu ukuran yang dapat mengklasifikasikan kecil atau besarnya perusahaan melalui total aset atau total penjualan dari perusahaan. Perusahaan yang besar akan menghindari fluktuasi laba karena dapat memengaruhi biaya pajak dan citra perusahaan.



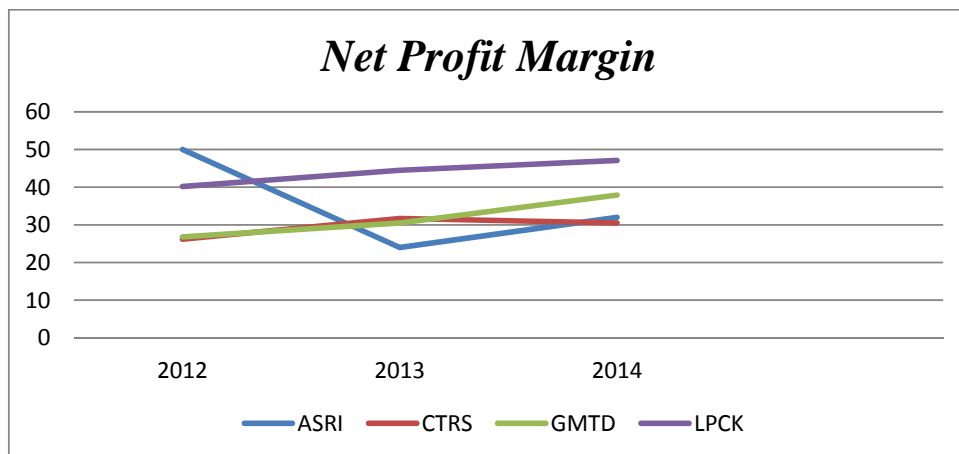
Sumber : Data diolah sendiri

**Gambar 1.2**  
**Ukuran Perusahaan**  
**Perusahaan Property dan Real Estate Periode 2012-2014**

Dari gambar 1.2 yakni hasil ukuran perusahaan untuk tiga tahun terakhir (tahun 2012-2014) perusahaan dari terlihat bahwa rata-rata ukuran perusahaan setiap perusahaan meningkat. Hal ini dapat dilihat bahwa semua perusahaan perbankan mengalami kenaikan karena adanya peningkatan total aktiva selama tiga tahun terakhir

Perataan laba memiliki hubungan dengan *Net Profit Margin*, sebagai salah satu rasio keuangan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan keuntungan bersih. Semakin besar NPM, maka kinerja perusahaan akan semakin produktif, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Rasio ini menunjukkan berapa besar persentase laba bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini, maka dianggap semakin baik kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi. Berdasarkan *the bonus plan hypothesis*, pada perusahaan yang mempunyai rencana bonus, perusahaan yang memiliki kinerja baik akan lebih leluasa untuk melakukan *income smoothing* karena dengan sendirinya laba dapat ditunda atau dipercepat karena manajemen tahu akan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba di masa mendatang. Perusahaan dengan kinerja rendah tentu akan mencoba mengangkat kinerja dengan melakukan *income smoothing* tetapi mereka tentu lebih sulit untuk menutupinya di tahun berikutnya (Wijaya Kusuma, 2004:76)



Sumber : Data diolah sendiri

**Gambar 1.3**  
**Profitabilitas**  
**Perusahaan Property & Real Estate Periode 2012-2014**

Pada gambar 1.3 menunjukkan kondisi profitabilitas dari tiga tahun pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* yaitu Alam Sutera Realty, Ciputra Surya, Goa Makassar Tourism Development dan Lippo Cikarang yang diukur berdasarkan pendekatan *Net Profit Margin* (NPM). Terlihat adanya penurunan pada perusahaan Alam Sutera Realty dari tahun 2012 ke 2013 tetapi terjadi kenaikan dari tahun 2013 ke 2014, Pada Perusahaan Ciputra Surya terjadi kenaikan dari tahun 2012 ke 2013 tetapi mengalami penurunan pada tahun 2014. Perusahaan Goa Makassar Tourism Development mengalami kenaikan dari tahun 2012 hingga 2014 Lalu pada perusahaan Lippo Cikarang juga mengalami kenaikan dari tahun 2012 hingga 2014.

Di Indonesia terdapat sejumlah kasus yang berhubungan dengan praktik perataan laba misalnya pada PT Katarina Utama, akibat lemahnya pengendalian internal tersebut pihak manajemen hanya merealisasikan sebagian kecil dana hasil penawaran umum, sedangkan selebihnya diduga diselewangkan oleh pihak manajemen RINA menggelar penawaran saham perdana kepada publik dengan melepas 210 juta saham atau 25,93% dari total saham, dengan harga penawaran Rp 160,- per lembar saham. Dari hasil IPO, didapatkan dana segar sebesar Rp 33,66 miliar. Rencananya seperti terungkap dalam prospektus perseroan, 54,05% dana hasil IPO akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan 36,04% dana IPO akan direalisasikan untuk membeli berbagai peralatan proyek.

Pada Agustus 2010 lalu, salah satu pemegang saham Katarina, PT Media Intertel Graha (MIG), dan Forum komunikasi Pekerja Katarina (FKPK) melaporkan telah terjadi penyimpangan dana hasil IPO yang dilakukan oleh

manajemen RINA. Dana yang sedianya akan digunakan untuk membeli peralatan, modal kerja, serta menambah kantor cabang, tidak digunakan sebagaimana mestinya. Hingga saat ini manajemen perseroan belum melakukan realisasi sebagaimana mestinya. Dari dana hasil IPO sebesar Rp 33,66 miliar, yang direalisasikan oleh manajemen ke dalam rencana kerja perseroan hanya sebesar Rp 4,62 miliar, sehingga kemungkinan terbesar adalah terjadi penyelewengan dana publik sebesar Rp 29,04 miliar untuk kepentingan pribadi. Selain itu, Katarina diduga telah memanipulasi laporan keuangan audit tahun 2009 dengan memasukkan sejumlah piutang fiktif guna memperbesar nilai aset perseroan.

Adanya kasus ini menunjukkan bahwa otoritas bursa masih mempunyai kelemahan dalam pengawasannya. Otoritas bursa, dalam hal ini BEI dan Bapepam-LK baru menyadari adanya keganjilan pada PT Katarina Utama Tbk setelah pada agustus 2010 pemegang saham dan Forum Komunikasi Pekerja Katarina (FKPK) melaporkan adanya penyimpangan dana hasil penawaran umum.

Contoh kasus yang terjadi di Indonesia mengenai penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu terungkapnya skandal Waskita Karya, salah satu BUMN Jasa Konstruksi yang diduga melakukan rekayasa laporan keuangan patut dicermati secara mendalam. Di tengah gembar gembor pelaksanaan implementasi GCG BUMN, kasus ini memberikan tamparan keras untuk kementerian Negara BUMN. Kasus Waskita, yang disebut-sebut sebagai Enronnya Indonesia menunjukkan bahwa Kementerian Negara BUMN perlu

berupaya lebih keras lagi dalam implementasi GCG di BUMN. Terbongkarnya kasus ini berawal saat pemeriksaan kembali neraca dalam rangka penerbitan saham perdana tahun lalu. Direktur utama Waskita yang baru, M. Choliq yang sebelumnya menjabat Direktur Keuangan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, menemukan pencatatan yang tak sesuai, dimana ditemukan kelebihan pencatatan Rp 400 miliar. Direksi periode sebelumnya diduga melakukan rekayasa keuangan sejak tahun buku 2004-2008 dengan memasukkan proyeksi pendapatan proyek multitalahun ke depan sebagai pendapatan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pihak-pihak yang melakukan internal kontrol mulai dari Dewan Komisaris sampai dengan Internal Audit tidak melakukan fungsinya dengan baik. Hal ini patut disayangkan mengingat GCG merupakan alat kontrol yang menciptakan check and balances yang digunakan dalam pengawasan pengelolaan perusahaan.

Contoh kasus lain yang terjadi di Indonesia (2013) mengenai penerapan PT.Garuda Indonesia Tbk yang kontraproduktif dengan *Good Corporate Governance* seperti yang diiklankan di media televisi dan media cetak. Pertama, kisruh sejumlah pilot lokal yang tergabung dalam Asosiasi Pilot Garuda (APG). Para awak pilot ini, bahkan sempat melakukan mogok setengah hari setelah melakukan pertemuan antara Direktur Utama Emirsyah Satar yang dimediasi oleh Menteri BUMN Mustofa Abu Bakar. Kedua, dalam laporan keuangan tengah tahun, PT. Garuda Indonesia (Persero) mengalami kerugian sepanjang semester pertama sebesar Rp 185,73 miliar. Pendapatan Garuda sebenarnya naik dari 7,75 triliun menjadi Rp 11,21 triliun. Namun beban usaha Garuda, juga melonjak tinggi dibanding periode sebelumnya. Dua berita ini, sangat menggelitik dan



sangat tidak elok. Karena selama ini perusahaan plat merah ini katanya telah menerapkan prinsip GCG, sehingga meraih penghargaan sebagai *The Most Trusted Company* dua kali berturut-turut pada 2009 dan 2010. Dengan penghargaan itu, Garuda dianggap sangat terpercaya dalam transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan *fairness*. Namun kedua berita tersebut menunjukkan bahwa GCG Garuda hanya slogan.

Fenomena di perusahaan *Property* dan *Real Estate* yaitu, Kisruh pembayaran surat utang antara kreditor dan manajemen PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) akhirnya membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) angkat suara. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida mendesak perusahaan untuk memberikan laporan terbuka kepada publik. Sebagai perusahaan terbuka yang sudah mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), keterbukaan diperlukan agar investor bisa melihat kondisi perusahaan secara langsung. Ketentuannya sudah jelas, peraturannya pun sudah ada di OJK. Bagi perusahaan terbuka setiap kejadian penting yang bisa memberi pengaruh kepada publik, harus diungkapkan ke publik, Nurhaida (27/9/2013). Nurhaida menjelaskan, semua yang berkaitan dengan keterbukaan informasi akan berdampak pada pasar. Namun diakui OJK, manajemen ELTY sudah memberikan laporannya kepada OJK. Keterbukaan informasi bisa lewat Public Expose atau dari website. Adapun laporannya juga sudah kami terima. Untuk saat ini, OJK mengaku tidak bisa mengintervensi persoalan utang yang tengah melilit perusahaan. Persoalan itu sudah diberikan dan ditanggung oleh perusahaan yang terkait.

Berdasarkan penelitian terdahulu pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* 88% terindikasi melakukan pertaan laba pada tahun 2011, sedangkan tahun 2010 73% terdapat perusahaan yang terindikasi melakukan tindakan peratan laba.

Alasan peneliti memilih perusahaan yang bergerak di bidang itu adalah karena perusahaan yang bergerak di bidang *Property* dan *Real Estate* cukup banyak diminati oleh para investor untuk menginvestasikan dana milik mereka. Perkembangan industri *Property* dan *Real Estate* saat ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dan memiliki prospek yang besar di masa yang akan datang mengingat jumlah penduduk yang terus menerus bertambah besar serta belum adanya ketetapan yang mewajibkan penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan *Property* dan *Real Estate*.

Motivasi peneliti dalam penelitian ini yang pertama adanya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu atau terdapat *research gap*, yang kedua adanya asimetri informasi yang dapat menjadi peluang bagi manajemen untuk melakukan perataan laba. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul : **”Pengaruh *Good Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan *Net Profit Margin* Terhadap Perataan Laba Pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014”**.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi, antara lain:

1. Tindakan *income smoothing* banyak di lakukan di perusahaan besar yang sudah *go public*.
2. Perhatian investor yang selama ini cenderung terpusat pada informasi laba tanpa memperhatikan proses yang digunakan untuk mencapai tingkat laba tersebut, sehingga terjadi asimetri informasi.
3. *Income smoothing* dilakukan karena adanya program bonus, motivasi perjanjian utang, pergantian CEO, meningkatkan kepercayaan kreditor dan investor, ataupun menghindari pajak dan kebijakan pemerintah.
4. Perusahaan *Property* dan *Real Estate* mempunyai masalah yang cukup kompleks.
5. Perusahaan BUMN dalam penerapan *Good Corporate Governance*-nya masih lemah berdasarkan fenomena yang ada dan dilihat dari penelitian sebelumnya.
6. Belum ada ketetapan dalam kewajiban penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan *Property* dan *Real Estate*.
7. Ukuran Perusahaan memberi alasan untuk melakukan tindakan perataan laba, karena semakin besar perusahaan cenderung melakukan perataan laba karena adanya motivasi penghindaran pajak dan biaya politik.
8. *Net Profi Margin* memberi alasan untuk melakukan tindakan perataan laba, karena semakin besar *Net Profi Margin* kinerja perusahaan akan semakin

produktif. Perusahaan yang memiliki kinerja baik akan lebih leluasa melakukan *income smoothing*.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya *Good Corporate Governance* dengan IPCG, Ukuran Perusahaan dengan Ln Total Aktiva dan *Net Profit Margin*.
2. Industri yang akan diteliti adalah *Property & Real Estate* dengan hasil laporan keuangan periode 2012-2014.

### **1.4. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah yaitu :

1. Apakah *Net Profit Margin*, Ukuran Perusahaan dan *good corporate governance* berpengaruh secara simultan terhadap Perataan laba khususnya pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *good corporate governance* berpengaruh negatif terhadap Perataan laba khususnya pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Perataan laba khususnya pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

4. Apakah *Net Profit Margin* berpengaruh positif terhadap Perataan laba khususnya pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji dan menganalisis apakah *good corporate governance*, Ukuran Perusahaan dan *Net Profit Margin* berpengaruh secara simultan terhadap Perataan laba.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis apakah *good corporate governance* berpengaruh negatif terhadap Perataan laba.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Perataan laba.
4. Untuk mengetahui apakah *Net Profit Margin* berpengaruh positif terhadap Perataan laba.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bagi penulis diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan teori, terutama akuntansi keuangan mengenai *agency theory* dan *good corporate governance* serta pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan yang dilaporkan.
2. Penelitian ini bagi para pemakai laporan keuangan dan praktisi penyelenggara perusahaan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam

memahami *good corporate governance*, ukuran perusahaan *net profit margin* dan praktik perataan laba

3. Penelitian ini bagi pihak lain mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi atau bahan tujuan yang dapat dipergunakan untuk menambah ilmu pengetahuan dan bahkan untuk mendukung dilakukan penelitian lanjutan tentang perataan laba pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.